

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dalam suatu negara hakikatnya untuk mensejahterakan rakyatnya. Sehingga untuk mengukur tingkat kesejahteraan tersebut diperlukan indikator khusus yang dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan dari berbagai aspek, baik itu pendidikan, kesehatan maupun ekonomi.

Pembangunan ekonomi meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan mengurangi pengangguran dalam konteks ekonomi.¹

Pembangunan daerah hakikatnya untuk menciptakan peningkatan kapasitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara handal dan profesional.² Sedangkan Lincoln Arsyad (2000) dalam Subandi (2016) memberikan definisi pembangunan daerah sebagai suatu proses kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya untuk mengelola sumber kekayaan daerah dengan berkolaborasi bersama sektor swasta

¹ Carunia Mulia Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017), h. 43.

² Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), ..., h. 13.

untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memeberikan stimulus kegiatan ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.³

Salah satu indikator untuk mengukur kemajuan perekonomian suatu negara yaitu melalui angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) setiap tahunnya, pendapatan per kapita, dan lain sebagainya.⁴ Sjafrizal menjelaskan untuk mengukur pembangunan yaitu dengan indikator kinerja makro, yaitu indikator yang dapat menggambarkan hasil (*outcome*) yang telah diterima atau pun dinikmati oleh masyarakat. Salah satu indikatornya dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).⁵

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hadir sebagai kritikan sekaligus perbaikan terhadap penggunaan angka pendapatan per kapita yang hanya fokus terhadap kesejahteraan masyarakat namun hanya pada sisi ekonomi saja. Hal ini dikarenakan indikator pendapatan per kapita mengenyampingkan aspek sosial seperti pendidikan dan kesehatan.⁶

³ Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 116.

⁴ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal, ...*, h. 31.

⁵ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), cetakan keempat, h. 264.

⁶ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan, ...*, h. 166.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur untuk menentukan sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara atau pun daerah. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*) dibentuk oleh beberapa dimensi diantaranya : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup yang layak.⁷

Namun, berdasarkan target pembangunan di tingkat regional ASEAN menetapkan bahwa pembangunan manusia menjadi target sektor prioritas dalam pembangunan strategik.⁸

Sejak dibukanya pasar tenaga kerja dalam ASEAN Economic Community pada tahun 2015, tenaga kerja yang memiliki SDM unggul dengan kapasitas *soft skill* dan *hard skill* yang memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan persaingan di dunia industri kerja.⁹

Suatu implikasi negatif dengan diterapkannya kebijakan pemerintahan terpusat (*centralized*) yaitu tidak meratanya pembangunan dan pelayanan publik yang terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya yang terjadi saat ini yaitu sistem perekonomian terpusat di Pulau Jawa saja sehingga menimbulkan kesenjangan antar daerah dan antar pulau.¹⁰ Dengan adanya pemusatan pembangunan tersebut pemerintah mengupayakan dengan meluncurkan Dana Perimbangan

⁷ Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

⁸ Irfan Sauqi Beik, dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 145.

⁹ Irfan Sauqi Beik, dkk, *Ekonomi Pembangunan*, ..., h. 152.

¹⁰ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal*, ..., h. 20.

meskipun hasil yang diharapkan belum optimal karena semakin banyak daerah yang mengajukan pemekaran sehingga memberatkan APBN.¹¹

Berkaitan dengan pemerataan pembangunan nasional, khususnya dalam hal meningkatkan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah.¹²

Otonomi daerah dianggap sebagai strategi atau paradigma pembangunan yang dianggap paling efektif dibandingkan dengan sistem sentralisasi (terpusat), hal ini disebabkan tujuan dari otonomi itu sendiri yaitu untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi materi mau pun psikisnya.¹³ Selain itu, Mubyarto (2001) menegaskan dalam Juli P. S (2003) bahwa sistem desentralisasi atau otonomi membuka ruang terhadap masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pembangunan daerahnya sendiri.¹⁴ Untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah maka salah satu hal yang

¹¹ Carunia Mulia Firdausy, *Kebijakan dan Strategi*, ..., h. 55.

¹² Hastu Sarkoro dan Zulfikar, *Pengaruh DAU dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi empiris pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia tahun 2012-2014)*, Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1), (2016) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 55.

¹³ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal*, ..., h. 27.

¹⁴ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal*, ..., h. 28.

dapat dilakukan adalah dengan menerapkan proses desentralisasi fiskal.¹⁵ Karena proses ini merupakan rencana jangka panjang, menghendaki komitmen pemerintah dalam melanjutkan pencapaian otonomi daerah di masa yang akan datang.¹⁶

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan pada sisi pendapatan dan pengeluaran Negara. Pendapatan berasal dari penghimpunan dana pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNBP), hibah serta instrumen lainnya. Sedangkan pengeluaran dialokasikan pada belanja rutin atau pun belanja pembangunan.¹⁷

Pemerintah melakukan pengeluaran untuk memberikan pelayanan terhadap publik. Pengeluaran ini tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja pemerintah ini terdiri atas belanja rutin dan belanja modal, investasi publik erat kaitannya dengan belanja modal.¹⁸

Anggaran sektor publik atau belanja modal penting dalam pembangunan perekonomian daerah, karena dapat membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya untuk mencapai kehidupan yang layak.¹⁹ Pengeluaran untuk investasi sektor ini penting

¹⁵ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal*, ..., h. 130.

¹⁶ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal*, ..., h. 131.

¹⁷ Irfan Sauqi Beik, dkk, *Ekonomi Pembangunan*, ..., h. 117.

¹⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik – Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), h.

¹⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor*, ..., h. 77.

untuk dialokasikan sebab investasi atau belanja modal memiliki efek jangka panjang yang dapat dirasakan oleh masyarakat.²⁰

Tujuan dari adanya otonomi yaitu untuk membentuk kemandirian daerah dalam melakukan pembangunan. Untuk meningkatkan kemandirian ini daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai instrumen fiskal yang tidak dapat dihindari dalam pembangunan perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.²¹ Karena secara teori untuk mengukur kemandirian daerah ini dapat dilihat dari besarnya sumbangan PAD sebagai sumber pendanaan pembangunan.²²

Penguatan kewenangan dalam pembangunan diperkuat dengan adanya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yaitu UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan di masyarakat dilakukan dengan cara peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Selain itu daya saing daerah juga perlu ditingkatkan dengan tetap memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah tersebut dalam sistem Negara Kestuan Republik Indonesia (NKRI).²³

Spesifiknya, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor

²⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor*, ..., h. 113.

²¹ Carunia Mulia Firdausy, *Kebijakan dan Strategi*, ..., h. 2.

²² Carunia Mulia Firdausy, *Kebijakan dan Strategi*, ..., h. 11.

²³ Carunia Mulia Firdausy, *Kebijakan dan Strategi*, ..., h. 9.

pendukung untuk meningkatkan IPM. Kemampuan keuangan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran harus dapat mencerminkan fungsi serta kapasitasnya sebagai pelaku pembangunan untuk memberikan pelayanan publik (*public service function*) dan melaksanakan pembangunan (*development function*).²⁴ Sumber-sumber keuangan utama daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Adanya ketimpangan PAD antara satu provinsi dengan provinsi yang lain di Indonesia, serta besarnya kegagalan pemerintah daerah yang telah mengalami pemekaran sebesar 60% dari keseluruhan daerah otonomi daerah dalam meningkatkan PAD,²⁵ selain itu rata-rata daerah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber daya daerahnya karena kurangnya kesiapan SDM dalam kuantitas mau pun kualitas serta lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.²⁶

Maka melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terdapat sumber lainnya yang dapat digunakan dalam pembangunan daerah yaitu dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta lain-lain pendapatan yang sah.²⁷

²⁴ Carunia Mulia Firdausy, *Kebijakan dan Strategi*, ..., h. 10.

²⁵ Carunia Mulia Firdausy, *Kebijakan dan Strategi*, ..., h. 11.

²⁶ Carunia Mulia Firdausy, *Kebijakan dan Strategi*, ..., h. 28-29.

²⁷ Hastu Sarkoro dan Zulfikar, *Pengaruh DAU*, ..., h. 55.

Namun, otonomi provinsi memiliki keterbatasan ruang gerak, sebab kabupaten atau kota memiliki wewenang yang lebih luas²⁸ sesuai amanat UU pasal 11 ayat (1) dan (2) yaitu:

“Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja”.

Sebagai bahan perbandingan, penulis memaparkan hasil penelitian di Bali pada tahun 2009-2013 tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pengaruh positif dan signifikan ini berarti semakin meningkat PAD dan Belanja Modal, maka peningkatan IPM juga meningkat. Terjadinya peningkatan disebabkan oleh pengalokasian Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal telah dimanfaatkan dengan tepat sehingga kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.²⁹

Namun yang terjadi di Provinsi Banten yaitu meskipun PAD setiap Kab/Kota di Provinsi Banten terus meningkat akan tetapi pada tahun 2016 Kota Cilegon mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah yang tadinya sebesar Rp. 579.585.575.000 menjadi Rp. 567.671.194.000

²⁸ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal, ...*, h. 28.

²⁹ Ida Ayu Candra Yunita Sari dan Ni Luh Supadmi, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.3 (2016), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, h. 2409

sedangkan IPM Kota Cilegon relatif terus meningkat sepanjang tahun 2013-2018. Dana perimbangan di Kab/Kota se-Provinsi Banten bersifat fluktuatif setiap tahun anggarannya, seperti pada tahun 2013 dana perimbangan Kab. Pandeglang mengalami penurunan. Hal ini juga terjadi pada Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan pada sisi Belanja Modal terdapat suatu fenomena penurunan anggaran pada tiap Kab/Kota selama kurun waktu 2013-2018, seperti di Kabupaten Lebak pada tahun 2016 sebesar Rp. 541.448.513.000 sedangkan pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi Rp. 374.004.043.000 begitu juga dengan Kabupaten Serang dari tahun 2013 sampai 2016 anggaran Belanja Modal cenderung menurun. Penurunan anggaran Belanja Modal juga terjad di Kota Tangerang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.

Permasalahan-permasalahan diatas menimbulkan minat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai indeks pembangunan manusia, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal pada Kab/Kota Se-Provinsi Banten.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2013-2018 dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah anggaran PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal dapat memengaruhi IPM, hal ini dikarenakan PAD dan Dana Perimbangan merupakan sumber dana untuk pembangunan suatu daerah sedangkan Belanja Modal merupakan alokasi anggaran untuk merealisasikan pembangunan.
2. Variabel PAD dan Dana Perimbangan menarik untuk diteliti karena sebagai bentuk otonomi daerah atau pun desentralisasi fiskal. Sehingga setiap daerah memiliki keleluasaan untuk melakukan pembangunan daerahnya dengan pengawasan dari pemerintah pusat. Hal ini penting untuk dibahas karena pemerintah daerah merupakan lembaga yang berwenang dalam melakukan kebijakan pembangunan ekonomi serta memahami masalah-masalah pembangunan di daerahnya.
3. Adanya permasalahan bahwa tidak sesuai jumlah pemasukan dan pengeluaran beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Banten, selama kurun waktu 2013-2018 anggaran belanja modal setiap daerah Kab/Kota cenderung menurun sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh Kab/Kota di Provinsi Banten relatif meningkat setiap tahunnya.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, fokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Dengan demikian, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten
3. Tahun penelitian dimulai dari 2013 – 2018.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena perumusan masalah merupakan langkah pertama yang akan memberi arah dalam suatu penelitian. Pada dasarnya perumusan masalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan, dan jawabannya akan ditemukan dalam penelitian yang dilakukan. Sebagaimana diuraikan di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota se-Provinsi Banten?
2. Bagaimanakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota se-Provinsi Banten?

3. Bagaimanakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota se-Provinsi Banten?
4. Bagaimanakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota se-Provinsi Banten?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota se-Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui besarnya Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota se-Provinsi Banten.
3. Untuk mengetahui besarnya Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota se-Provinsi Banten.
4. Untuk mengetahui besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota se-Provinsi Banten.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini penulis berharap banyak manfaat yang dapat diperoleh terutama dari bidang ilmu pengetahuan mengenai besarnya PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Adapun manfaat lainnya yang penulis harapkan adalah kesempatan dalam membahas teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan berlangsung kedalam penelitian ini dan kemampuan untuk menerapkan pada dunia ekonomi dan bisnis didalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan, tolok ukur dan gambaran oleh pemerintah daerah dalam mengontrol juga mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil untuk melakukan realisasi pembangunan.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan, referensi atau bahan perbandingan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran mengenai perekonomian di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran, kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.³⁰

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹ Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Dana Perimbangan merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk distribusi pendapatan untuk membantu keuangan daerah juga sebagai bentuk desentralisasi fiskal. Hal ini dilakukan agar dapat membantu pembangunan setiap daerah juga mengurangi tingkat ketimpangan setiap

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 64

³¹ Hastu Sarkoro dan Zulfikar, *Pengaruh DAU, ...*, h. 57.

daerah, sehingga besaran dana perimbangan setiap daerah berbeda dengan daerah lainnya.

Pengalokasian anggaran daerah dan belanja modal mutlak harus dilakukan sebagai bentuk realisasi anggaran pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal dilakukan oleh Pemda (Pemerintah Daerah) dalam pengadaan aset daerah sebagai investasi, pada akhirnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena adanya peningkatan sarana dan prasarana publik sehingga menunjang peningkatan pelayanan pada sektor publik.³²

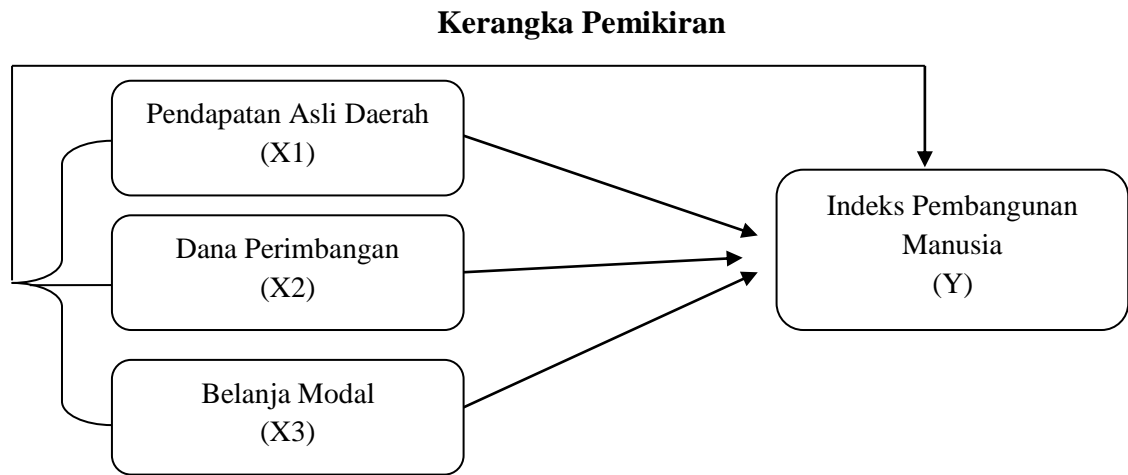
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)* merupakan suatu indeks keberhasilan pembangunan daerah yang tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi. Karena Menurut *United Nation Development Programme (UNDP)* suatu pembangunan memiliki 4 elemen utama yaitu pemerataan (*equity*), Produktivitas (*productivity*), pemberdayaan (*empowerment*) dan kesinambungan (*sustainability*). Sehingga IPM harus didukung oleh pengalokasian anggaran pembangunan oleh pemerintah.³³

Dari penjelasan diatas maka penulis dapat menggambarkan kerangka pemikiran yang tertuang didalam penelitian ini sebagai berikut:

³² Ida Ayu Candra Yunita Sari dan Ni Luh Supadmi, *Pengaruh Pendapatan, ...*, h. 2424.

³³ Teja Rinanda dan Subambang H, *Pendapatan Asli, ...*, h. 24.

Gambar 1.1



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa penulis akan melakukan penelitian dengan judul analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Tempat yang dipilih yaitu di seluruh Kab/Kota di Provinsi Banten yang memiliki kelengkapan data realisasi pemasukan dan pengeluaran anggaran pada tahun 2013 – 2018.

Alasan utama penulis memilih variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal karena anggaran pendapatan utama pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan sebagai penunjang dalam peningkatan kualitas masyarakatnya. Jumlah PAD, Dana Perimbangan serta Belanja Modal selalu berbeda setiap tahunnya sehingga dapat memicu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota Se-Provinsi Banten.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pertama merupakan penduluan, penulis menjadikan tolok ukur dalam langkah-langkah penelitian. Pada bab ini akan membahas langkah awal dalam menyusun skripsi, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka

Pada bab kedua merupakan kajian pustaka untuk membahas teori-teori dan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menjelaskan tentang Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, Pembangunan Ekonomi dalam Islam, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu yang relevan serta hipotesis penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ketiga ini merupakan metodologi penelitian yang akan membahas metode penelitian yang akan digunakan berdasarkan pokok masalah utama untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Peneliti akan menguraikan tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel,

jenis penelitian dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan pengolahan data serta teknik analisis data.

Bab IV : Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab keempat merupakan pembahasan hasil penelitian yang akan menguraikan hasil analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan beserta analisa dalam perspektif ekonomi syariah.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab kelima merupakan penutup akan menguraikan hasil penelitian dalam kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah diolah juga dibahas sebelumnya, dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan penelitian selanjutnya serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait seperti para lembaga pemerintah daerah, para praktisi dan masyarakat umum.